

**PERAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI UPAYA STRATEGIS DALAM  
PENINGKATAN EKSISTENSI  
KEDAULATAN MARITIM INDONESIA**

**Indro Sulistyanto**

email: indrosulistyanto@yahoo.co.id

Diterima Tanggal: 16 Januari 2017    Disetujui Tanggal: 27 Januari 2017

***Abstrak***

*Latar belakang dilakukannya penelitian adalah terciptanya kesinambungan program, untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan ruang yang kompleks, karena merupakan salah satu unsur utama dalam tata ruang pembangunan.*

*Permasalahan yang terjadi menyangkut belum tersedianya arahan dan bentuk spesifik pemanfaatan ruang, sehingga memberi pengaruh yang sangat besar bagi program pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar luas di Indonesia. Adanya indikasi intervensi yang masif pemanfaatan ruang oleh asing yang cenderung mengabaikan ekosistem darat dan perairan.*

*Tujuan jangka panjang dari kegiatan penelitian ini adalah terstrukturkannya upaya penataan dan mengantisipasi pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang khususnya di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai upaya strategis dalam peningkatan eksistensi kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan Indonesia.*

*Metodologi yang direncanakan adalah peran pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, dalam upaya strategis dalam peningkatan eksistensi kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan Indonesia. Diharapkan dapat diperoleh gambaran seutuhnya dari pembangunan pemanfaatan sebagai lahan budidaya dan pariwisata sebagai upaya strategis dalam peningkatan eksistensi kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan Indonesia.*

*Manfaat dari penelitian ini adalah terciptanya langkah inovatif bagi pengembangan ilmu perancangan arsitektur, perencanaan kota dan wilayah, serta lingkungan. Mengingat dominasi pemanfaatan ruangnya diharapkan pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang yang berciri khas pesisir dan pulau-pulau kecil dapat didukung oleh arahan dan pengendalian yang benar untuk menghindari terganggunya kelangsungan perkembangan wilayah, baik kegiatan fungsional maupun aktivitas investasi budidaya dan pariwisata pulau-pulau kecil di dalamnya.*

***Kata kunci :*** *kedaulatan maritim, sumberdaya perairan, pemanfaatan ruang, pesisir dan pulau-pulau kecil*

**1. PENDAHULUAN**

Kegiatan penelitian tentang **Pengaruh Eksotisme Pulau-Pulau Kecil dalam Mendukung Upaya Strategis Peningkatan Eksistensi Kedaulatan**

**Maritim dan Sumberdaya Perairan Indonesia** adalah untuk menyelesaikan permasalahan umum yang ada dalam upaya pembangunan dan pengembangan

pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berangkat dari adanya beberapa permasalahan spesifik, yang terdiri atas:

- a. Permasalahan yang muncul karena adanya kebijakan pengembangan wilayah khususnya pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Permasalahan yang muncul karena kemampuan fisik lahan yang bervariasi
- c. Permasalahan yang muncul dari tingginya intervensi asing karena ekso-tisme pulau-pulau kecil yang menarik minat investasi budidaya maupun pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem darat dan perairan
- d. Permasalahan yang muncul akibat agresifitas perkembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang, yang memerlukan kebijakan pengendalian sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaannya

Adapun isu spesifik yang ada di setiap pesisir dan pulau-pulau kecil muncul berkaitan dengan kondisi khusus yang terjadi dalam upaya pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang yang ada dan pada saatnya diprediksikan akan terus mengalami perkembangan, sejalan dengan aktivitas investasi budidaya dan pariwisata pulau-pulau kecil yang bergiat di dalamnya.



**Gambar 1 : Fenomena Sistem Transportasi Andalan yang Menghubungkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Masing-masing kawasan dipertimbangkan terhadap fenomena fisik yang berkembang, meliputi:

- a. Penanganan pemanfaatan ruang di kawasan rawan degradasi kualitas lingkungan
- b. Pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan yang menarik minat investasi untuk budidaya maupun pariwisata
- c. Kebijakan pemanfaatan ruang pada pulau-pulau kecil yang belum dimanfaatkan dengan optimal
- d. Penanganan pemanfaatan ruang yang berorientasi kepada monopoli sumberdaya dan destinasi wisata yang unik
- e. Penanganan pemanfaatan ruang di kawasan konservasi sumberdaya alam maupun purbakala.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Desain dan metode penelitian yang direncanakan dalam kegiatan Penelitian tentang **Pengaruh Eksotisme Pulau-Pulau Kecil dalam Mendukung Upaya Strategis Peningkatan Eksistensi Kedaulatan Maritim dan Sumberdaya Perairan Indonesia**, tersusun atas suatu kerangka pemikiran: pendekatan, metode, dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyelesaian penelitian ini.

### 2.1. Pendekatan Penelitian

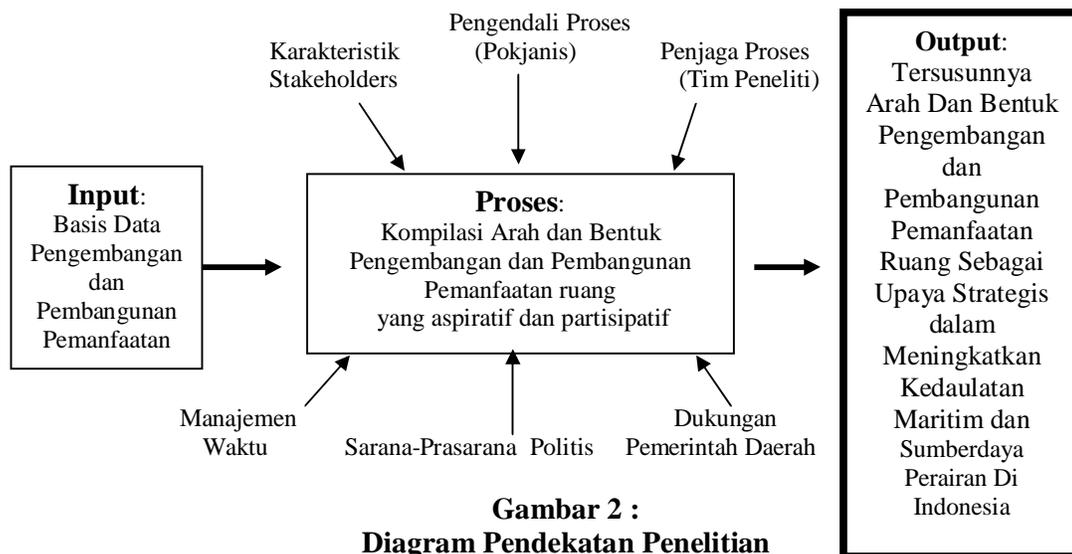
Kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengakomodasi pendekatan penelitian dapat dijelaskan dengan kerangka: “*input → proses → output*”.

Pengertiannya adalah bahwa dari data rencana pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang setiap pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu disusun skenario pembangunan pemanfaatan ruang yang memiliki legitimasi dan legalitas serta mewujudkan dalam perangkat legal-formal guna mem-backup penerapan rencana pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang tersebut. Mengingat

perangkat tersebut kelak akan mengikat semua pihak yang berkecimpung dalam dunia pemanfaatan ruang di masing-masing pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunannya pun harus aspiratif dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang demokratis. Oleh karena itu materi-materi yang akan disepakati harus dikomunikasikan bersama. Untuk itu dalam teknis pelaksanaan nantinya perlu ditempuh proses yang benar. Proses ini bersifat partisipatif, memerlukan kehadiran dan keterlibatan berbagai pihak. Keterlibatan ini merupakan syarat untuk bisa sampai pada kesepakatan bersama, yang kelak akan ditetapkan sebagai panduan bersama dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, proses menjadi sangat penting, karena melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Pengelolaan proses mendapat perhatian yang besar, khususnya untuk menyelesaikan dan mencari solusi terbaik

atas konflik kepentingan yang muncul serta mengelola waktu secara efisien dan bisa diterima semua pihak.

Sedangkan hasil yang berupa arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan di Indonesia, diharapkan akan cukup memuaskan sejauh masukan datanya memadai dan prosesnya berjalan dengan baik. Perlu pemantapan dahulu basis data yang sudah dimiliki, mengingat data ini akan menjadi input/masukan yang sangat penting bagi berlangsungnya proses yang ideal. Pemantapannya sendiri membuka peluang adanya penyempurnaan-penyempurnaan, baik dari sisi substansi data maupun presentasinya. Kesemuanya adalah agar data benar-benar mantab dan dapat dipergunakan. Hanya setelah data cukup mantap dan memadai, maka proses pokok dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.



**Gambar 2 :**  
**Diagram Pendekatan Penelitian**

## 2.2. Metode Pelaksanaan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian dan kerangka pemikiran, maka metode pelaksanaan penelitian yang dilakukan mencakup dua hal penting berikut:

Pelaksanaan penelitian ini akan berujung pada penyusunan arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kedaulatan maritim

dan sumberdaya perairan di Indonesia, setelah *database* pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang dapat disajikan dengan baik. Pendekatan pelaksanaan kegiatannya dapat dikemukakan:

- a. Menyusun basis data rencana pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang
- b. Memantapkan informasi mengenai pembangunan pemanfaatan ruang melalui analisis yang mendalam terhadap basis data yang telah tersedia.
- c. Menyiapkan landasan konsep akademis untuk mendukung implementasi rencana pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang yang mengarah pada penyiapan perangkat legal-formal.

Di dalam implementasinya, tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

- a. *Mereview* dan mengevaluasi data-data pemanfaatan ruang untuk dapat dituangkan ke dalam *database* yang ada dengan mencermati substansi data, sistematikanya, maupun melihat pada teknik presentasinya. Untuk masalah validitas substansi data, evaluasi ditujukan dengan mengecek kemungkinan adanya kekurangan jenis data, kelengkapan dari kekosongan, kebaruan data, maupun kesalahan data. Kegiatan ini diikuti dengan *merevisi* dan *meng-update* sesuai kebutuhan.
- b. Menganalisis secara mendalam data yang ada untuk memunculkan informasi penting, menyangkut:
  - Prediksi kondisi dan kebutuhan pada sepuluh tahun ke depan, termasuk *backlog* rumah sesuai level masyarakat yang membutuhkannya.
  - Perkiraan arah perkembangan pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata secara keruangan.

- Penetapan program pembangunan yang sesuai dan tepat, menyangkut lokasi dan waktunya. Misalnya: penetapan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun; pembangunan rumah susun atau rumah susun sederhana sewa; peningkatan kualitas lingkungan pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata kumuh (slums); penanganan pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata *ilegal (squatters)* dengan program rusun di atas, relokasi, atau pemulangan ke tempat asal; peremajaan kota (*urban renewal*); dan sebagainya.
- c. Menyusun arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan di Indonesia, dengan mengikuti pedoman rencana pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang. Dalam hal ini kerja tim peneliti dibantu oleh kelompok kerja teknis (pokjanis) yang berfungsi:
  - Menjembatani hubungan dengan semua pihak (*stakeholders*) yang terkait dalam proses penyusunan pekerjaan ini, baik instansi teknis, pemerintahan setempat, pengembang pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata dan pembangun usaha budidaya dan pariwisata, akademisi, LSM, maupun masyarakat.
  - Menyusun jadwal pertemuan yang melibatkan banyak pihak tersebut di atas pada awal kegiatan.
  - Membahas segala kemajuan kerja yang dihasilkan oleh tim peneliti.

### 3. PROSES DAN HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya pembangunan pemanfaatan ruang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dalam bentuk tugas dan peran masing-masing secara seimbang. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang lebih dominan dalam memfasilitasi dan memberikan mediasi, sedangkan masyarakat diharapkan dapat lebih bertanggung jawab secara penuh dalam memenuhi kebutuhan akan usaha budidaya dan pariwisata, terutama secara fisik.

Arthur B. Gallion (1994) berpendapat, bahwa pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata merupakan unsur terpenting dalam pemanfaatan pulau-pulau yang memiliki nilai eksotisme tinggi. Banyaknya program-program yang dikembangkan selama bertahun-tahun jarang menghasilkan suatu rencana menyeluruh untuk memenuhi semua tingkat kebutuhan masyarakat, justru asing yang mampu memanfaatkan peluang tersebut Bagian yang paling sulit dicapai dalam rencana komprehensif adalah unsur usaha budidaya dan pariwisata. Unsur ini memerlukan peran serta yang maksimal dari sektor swasta untuk mencapai sasaran dan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menyangkut kebutuhan akan usaha budidaya dan pariwisata bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan rendah.

Simon Eisner (1994) menyatakan, bahwa unsur usaha budidaya dan pariwisata harus terdiri dari identifikasi dan analisis kebutuhan usaha budidaya dan pariwisata sekarang dan yang diprakirakan, serta suatu pernyataan tujuan, kebijaksanaan, sasaran yang dikuantifisir, dan program penjadwalan untuk preservasi, perbaikan, dan pembangunan usaha budidaya dan pariwisata yang spesifik untuk masing-masing pulau. Unsur usaha budidaya dan pariwisata harus mengidentifikasi lokasi yang memadai untuk usaha budidaya dan pariwisata, serta harus

mengadakan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang diproyeksikan dari semua golongan ekonomi pada suatu wilayah.

Usaha budidaya dan pariwisata, mungkin merupakan permasalahan lingkungan yang tidak terduga sebelumnya (Bruce Stokes, 1982). Di masa lalu pengikut lingkungan menganjurkan dikurangnya pertumbuhan usaha budidaya dan pariwisata, yang telah meruntuhkan impian banyak orang untuk dapat memiliki usaha di atas persil lahan yang dimilikinya. Ironisnya dewasa ini impian tersebut telah mati, justru karena masyarakat telah mengabaikan keterbatasan sumberdaya alam pada berbagai infrastruktur yang mampu mendorong kegiatan budidaya maupun pariwisata pada masing-masing pulau yang tidak terencana.

Penggunaan lahan untuk usaha budidaya dan pariwisata di daerah pulau-pulau kecil menunjukkan prosentase yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan yang lain (Sammis B. White, 1992). Sektor usaha budidaya dan pariwisata memegang peran penting dalam perekonomian nasional, dan merupakan kebijakan sosial nasional. Sebagian besar usaha budidaya dan pariwisata dimiliki secara pribadi dan bersifat eksklusif, meskipun pemerintah ikut terlibat aktif dalam berbagai aspek usaha budidaya dan pariwisata. Justru pada beberapa pulau-pulau kecil yang terpencil dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, telah dieksploitasi secara masif oleh investor asing.

Pengaruh Pengembangan dan Pembangunan Pemanfaatan ruang dalam Mendukung Tata Ruang Wilayah Pesisir (Indro Sulistyanto, 2007), menunjukkan dominasi pengembangan dan pembangunan yang tidak terkendali baik di wilayah pesisir dengan semakin menyusutnya lahan-lahan produktif menjadi lahan-lahan terbangun untuk pemanfaatan ruang, maupun semakin padatnya pemanfaatan ruang kota. Kondisi ini perlu dian-

tisipasi dengan adanya pedoman dan pengendalian melalui *database* dan arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan di Indonesia bagi pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir maupun di pulau-pulau kecil.

Peran Pendampingan Masyarakat dalam Penyusunan *Community Action Plan* Pemanfaatan Ruang (Indro Sulistyanto, 2007) dan Tribina sebagai Model Pendampingan Masyarakat dalam Program Pengembangan dan Pembangunan Pemanfaatan ruang (Indro Sulistyanto, 2006), menunjukkan perlunya suatu model pengembangan pemanfaatan ruang, dengan tidak hanya menyentuh pada fisik, namun juga bagi ekonomi produktif, dan pendayagunaan lingkungan pemanfaatan ruang.

Studi tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Pelaksanaan Penataan Bangun-bangunan dan Lingkungan Pemanfaatan ruang sebagai Lahan Budidaya dan Pariwisata (Indro Sulistyanto, 2006) dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menata bangun-bangunan dan lingkungan pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata yang memiliki potensi spesifik karena keberadaannya pada kawasan yang memiliki karakteristik spesifik, baik untuk kegiatan budidaya produktif (tambak), maupun potensi wisata yang eksotis, disusun agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perkembangan pemanfaatan ruang, dapat lebih memberi arti dengan menyentuh pada terjaganya ekosistem dan lingkungan pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata yang memiliki karakteristik spesifik dan dapat berjalan seiring dan serasi dalam suatu konsep pembangunan yang terlanjutkan.

Kerangka Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemanfaatan Ruang sebagai Lahan Budidaya dan Pariwisata (DPU.

Dirjen. Cipta Karya, 2006), dicapai melalui indikator kinerja: *output*, *outcome*, dan manfaat bagi terwujudnya pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan, dan memiliki karakteristik spesifik baik dari alam/lingkungan maupun budaya yang menjadi dasar terbentuknya destinasi wisata yang eksotis dalam suatu konsep pembangunan yang terlanjutkan.

Hasil kajian atas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pemanfaatan Ruang di Daerah (RP3RD) yang selama ini berlangsung, diperoleh gambaran tentang maksud pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang (Indro Sulistyanto, 2006 dan 2008), sebagai berikut:

- a. Terwujudnya keseluruhan kebutuhan akan pengaturan dan mekanisme pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang, sejak perencanaan, implementasi, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian, pengawasan dan pengendalian hasil pembangunan yang berkelanjutan
- b. Pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang diupayakan dengan mengakomodir aspirasi dan kepentingan *stakeholders*, termasuk terbukanya peluang masyarakat untuk berperan serta dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemanfaatan ruang
- c. Pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- d. Pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang di harapkan melembaga pada institusi terkait yang menangani permasalahan pemanfaatan ruang
- e. Pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan usaha budidaya dan pariwisata pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata yang melibatkan sepenuhnya peran serta masyarakat

- f. Pada dasarnya pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang harus mengacu pada kerangka penataan ruang wilayah
- g. Pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang diharapkan dapat berlangsung secara tertib terencana dan terorganisasi dengan baik, berdaya dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Penelitian tentang Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Indro Sulistyanto, 2009), didasarkan pada pertimbangan atas perkembangan beberapa bagian kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil karena kondisi dan potensi yang dimiliki nantinya akan berkembang sebagai kawasan yang diprediksikan akan tumbuh dan berkembang dengan potensi spesifik yang dimilikinya. Perkembangan beberapa kawasan yang nantinya diprediksikan akan berkembang sebagai kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau dengan potensi spesifik yang tidak didukung oleh arahan dan pengendalian yang benar, akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang (baik laut, pesisir, dan daratan/pulau), dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan, yang pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga akan berakibat pada terganggunya kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, baik yang berujud terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas investasi budidaya dan pariwisata pulau-pulau kecil di dalamnya.

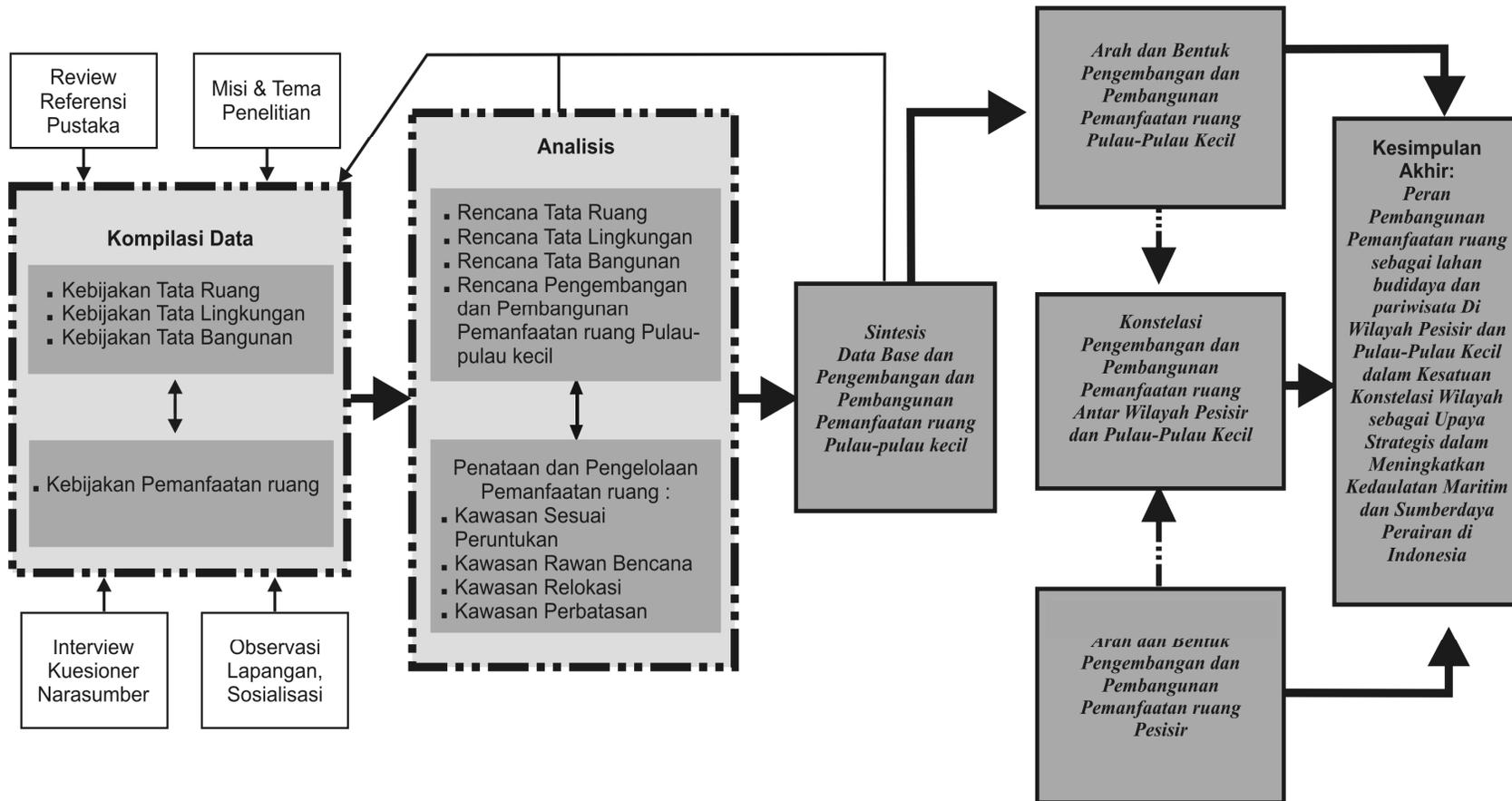
Dalam konteks ekonomi, maka kondisi ini akan memberi implikasi yang luas terhadap menurunnya *supply* dan *demand*. Dalam konteks lingkungan, maka kondisi tersebut akan memberi implikasi serius terhadap ekosistem, dan degradasi kualitas lingkungan hidup maupun binaannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pada prinsipnya penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan pendekatan wilayah yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa keseluruhan unsur-unsur pembentukan ruang seperti manusia/mahluk hidup dan kegiatan sosial ekonomi dikawasan dan sarana prasarana pendukungnya serta lingkungannya membentuk suatu kesatuan dalam suatu sistem wilayah.

Penelitian tentang Peran Pembangunan Pemanfaatan sebagai lahan budidaya dan pariwisata sebagai Upaya Strategis dalam Peningkatan Eksistensi Kedaulatan Maritim dan Sumberdaya Perairan Indonesia akan menjadi momentum yang tepat untuk dapat digunakan sebagai informasi pembangunan pemanfaatan ruang di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersusun secara sistematis dalam arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan, sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintah vertikal dan penyusunan rencana program kegiatan oleh berbagai pelaku pembangunan di bidang pemanfaatan ruang, khususnya untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam konteks dominasi kegiatan maupun pemanfaatan lahan yang semakin progresif dalam pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang akan didapatkan kejelasan rencana strategis dalam peningkatan eksistensi kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan Indonesia.

**Bagan Alir Penelitian**  
**Pengaruh Eksotisme Pulau-Pulau Kecil dalam Mendukung Upaya Strategis**  
**Peningkatan Eksistensi Kedaulatan Maritim dan Sumberdaya Perairan Indonesia**  
 Studi Kasus: Perkembangan dan Pembangunan Pemanfaatan ruang Wilayah Pulau-Pulau Kecil  
 di Kabupaten Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur



#### 4. KESIMPULAN DAN LUARAN

Arah pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai lahan budidaya dan pariwisata wilayah pesisir sebagai dokumen yang diperlukan untuk mengantisipasi pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang pantai dan pulau-pulau kecil, dan imbasnya bagi sektor maupun wilayah lain di sekitarnya. Pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang yang tidak didukung oleh arahan dan pengendalian yang benar akan berakibat pada keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaannya, mengingat dominasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan ruang. Namun di lain sisi dengan banyaknya sumberdaya perairan di wilayah pesisir (pantai dan pulau-pulau kecil) di Indonesia, maka keberadaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir justru diharapkan akan memberi perkuatan strategis peningkatan eksistensi kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan Indonesia. Hasil penelitian ini akan memberi implikasi yang berwawasan ke depan yang menentukan bagi perkembangan ilmu perancangan arsitektur perencanaan wilayah/kota, dalam bentuk pengembangan wawasan baru keilmuan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pantai dan pulau-pulau kecil yang terbentang di sebagian besar wilayah Indonesia, dan kedepan diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan binaan yang seimbang dan terlanjutkan.

Dengan melihat pada latar belakang dan isu permasalahan lokal yang berkembang, maka bentuk-bentuk upaya penanganan pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang diharapkan dapat memberikan percepatan pada tersusunnya skenario pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan munculnya persoalan-persoalan kritis.

Dengan penyusunan *data base* pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang yang langsung diikuti dengan penyiapan arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan di Indonesia, maka akan dapat diraih tujuan-tujuan: (1) mendorong kepedulian pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan pemanfaatan ruang melalui proses bersama dalam penyusunan arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan di Indonesia; dan (2) menyediakan bahan yang siap dilanjutkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang memenuhi persyaratan legal-formal dalam pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang.

Secara praktis, yang menjadi sasaran dari penyusunan *data base* dan persiapan arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan di Indonesia pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang ini mencakup dua hal, yakni: (1) termotivasinya pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan pemanfaatan ruang; serta (2) tersedianya arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan di Indonesia pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang yang disusun secara aspiratif melibatkan semua *stakeholders* pembangunan pemanfaatan ruang.

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang pembangunan, dan pengembangan di bidang pendidikan dan jasa, sebagai berikut:

a. **Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK):**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan dasar-dasar ilmu dan teknologi perancangan arsitektur di bidang penanganan pemanfaatan ruang, perencanaan kota dan wilayah, dan lingkungan (hidup dan binaan):

b. **Menunjang Pembangunan:**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi proses pembangunan, khususnya dari pengembangan kebijakan tata ruang kota dan wilayah, tata bangun-bangunan khususnya pemanfaatan ruang, dan tata lingkungan.

c. **Pengembangan Pendidikan dan Jasa:**

Penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengembangan bidang pendidikan dan asosiasi jasa layanan tata ruang, tata bangun-bangunan khususnya di bidang pemanfaatan ruang, dan tata lingkungan dalam memberi inovasi produk layanan jasanya dengan mempertimbangkan arti penting peran pemanfaatan ruang bagi kepentingan pemanfaatan ruang bagi perencanaan tata ruang kota, perancangan bangun-bangunan, dan penataan lingkungan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anthony J. Catanese and James C. Snyder, *Urban Planning*. Mc. Graw Hill, Inc., New York, 1988
- Arthur B. Gallion and George Stemlieb, *America's Housing: Prospects and Problems*, Center for Urban Policy Research, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1994
- Bruce Stokes, Housing Committee of The American Institute of Architects, *Housing for a Maturing Population*, Urban Land Institute, Washington, D.C., 1982
- Indro Sulistyanto, *Studi tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Pelaksanaan Penataan Bangun-Bangunan dan Lingkungan pada Lahan Budidaya Dan Pariwisata di Kabupaten Bulungan*, Dinas PU. Propinsi Kalimantan Timur, Yogyakarta, 2006
- Indro Sulistyanto, *Pengaruh Perkembangan Pemanfaatan ruang dalam Mendukung Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan*, Satuan Kerja Peningkatan Kualitas Lingkungan DPU. Propinsi Kalimantan Timur, 2007
- Indro Sulistyanto, *Peran Pendampingan Masyarakat dalam Penyusunan Community Action Plan Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulungan*, Satuan Kerja Peningkatan Kualitas Lingkungan DPU. Propinsi Kalimantan Timur, 2007
- Indro Sulistyanto, *Tribina sebagai Model Pendampingan Masyarakat dalam Program Pengembangan dan Pembangunan Pemanfaatan ruang di Desa Sitimulyo*, Dinas PU. Propinsi DI. Yogyakarta, Yogyakarta, 2006
- Indro Sulistyanto, *Guidelines Procedure Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembangunan Pemanfaatan ruang di Propinsi DI. Yogyakarta*, Bappeda. Propinsi DI. Yogyakarta, Yogyakarta, 2005
- Sammis B. White, *Rethinking Housing and Community Development Policy*, School of Architecture and Urban Planning, University of Wisconsin-Milwaukee, The Images Publishing Group Pty Ltd., 1992
- Simond Eisner and Schmidman, *Housing Supply and Affordability*, Urban Land Institute, Washington D.C., McGraw-Hill Book Company, 1994

-----, *Kerangka Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Lahan Budidaya dan Pariwisata*, DPU. Dirjen Cipta Karya, Jakarta, 2006

-----, *Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pemanfaatan ruang di Daerah (RP4D)*, DPU. Dirjen Cipta Karya, Jakarta, 2006

**Biodata Penulis:**

**Indro Sulistyanto**, Alumni Jurusan Teknik Arsitektur UGM Yogyakarta (1982), Pasca Sarjana (S2) Program Magister Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta (1999), Dosen pada Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UTP Surakarta Tahun 1985 sampai sekarang, Pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Arsitektur, dan Dekan Fakultas Teknik UTP Surakarta, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Cabang Surakarta Tahun 2016 sampai sekarang, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Surakarta Tahun 2011 sampai sekarang.